
STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) UNTUK MEMENANGKAN CALON KEPALA DAERAH YANG DIUSUNGNYA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

GUSTIAR HAMONANGAN
IAIN Padangsidimpuan

Abstract

This research focused on *Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untuk Memenangkan Calon Kepala Daerah Yang Diusungnya di Kabupaten Padang Lawas Utara*. The problems of this research was to know how *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* won the candidate for regional head who their carried and what their problems. Elections are the first step for political parties to compete for power to occupy executive or legislative seats. Political parties and candidates need to think the strategies that can determine the victory to win the seat of power. It likes *Partai Keadilan Sejahtera* who carried the candidate for regional head in Kabupaten Padang Lawas Utara. The objectives of the research: (1) to know the strategy used by *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* in regional head election in *Kabupaten Padang Lawas Utara*, (2) to know the problems faced by *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* in applying the strategy in regional head election in *Kabupaten Padang Lawas Utara*. This research is qualitative research. It was located at DPD office *Partai Keadilan Sejahtera*. The data was collected through interview of administer DPD (*Dewan Pengurus Daerah*) *Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara*. Besides, it is used data and document to support the information needed. The result of this research shows that there are some strategies used by *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* and problems which were faced by them. he strategies are by doing service to community, socialization in conveying the vision and mission of candidate pair, campaign, doing event, and apply Islamic ideology. The problem includes less coordination from candidate to party their carried.

Keywords: *PKS, Regional Head, Padang Lawas Utara*

Abstrak

Penelitian skripsi ini berjudul *Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untuk Memenangkan Calon Kepala Daerah Yang Diusungnya di Kabupaten Padang Lawas Utara*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya dan apa saja

yang menjadi kendala bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Pemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing untuk merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif dan/atau legislatif. Partai politik dan kandidat perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan untuk meraih kursi kekuasaan tersebut. Seperti halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung calon kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan penelitian ini : (1) mengetahui strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam menerapkan strateginya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera. Penggalan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Strategi tersebut antara lain dengan melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sosialisasi dalam menyampaikan visi-misi pasangan calon, kampanye, membuat kegiatan (*Efent*), dan menerapkan ideologi Islam. Kendala-kendala yang dihadapi meliputi kandidat kadang kurang berkordinasi dengan partai.

Kata Kunci: *PKS, Kepala Daerah, Padang Lawas Utara*

PENDAHULUAN

Sejarah munculnya partai-partai politik di Negara yang satu dengan Negara yang lain memang tidak sama. Tetapi ada satu benang merah yang mepertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang berkaitan dengan hak antar warga Negara.¹

Partai politik hadir ditengah-tengan masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang

¹ Kajung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 59

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.²

Jalan untuk menuju Negara yang demokrasi yaitu dengan pemilihan umum yang merupakan langkah awal untuk menentukan pemerintahan merupakan bentuk demokrasi yang harus dilakukan oleh setiap Negara yang yang mengaku menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap Negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi seperti Indonesia. Pemilu dapat dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan perbaikan demokrasi di Indonesia dan dianggap sebagai tahap penyampaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Negara ini. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali kepada rakyat yaitu, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta akhirnya rakyat bebas menentukan pilihannya mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hingga kepala daerah di Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyebutkan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.³

Mengingat penguatan parlemen ternyata tidak serta-merta mampu mempercepat proses demokratisasi di daerah, dimunculkanlah kerangka kelembagaan baru, yakni adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses ini diharapkan mampu mereduksi secara luas adanya 'pembajakan kekuasaan' yang dilakukan oleh partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Di samping itu, Pilkada secara langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat.⁴

Secara konseptual, pasangan calon Kepala Daerah itu berkemungkinan memenangkan Pilkada secara langsung harus mempunyai tiga modal utama yaitu, modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*).

² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) ham.149

³ Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945

⁴ *Ibid.*, hlm. 183

Ketiga modal itu memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Artinya pasangan calon Kepala Daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Argumen yang tergabung adalah bahwa semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai Kepala Daerah.

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti kontestasi di dalam Pilkada secara langsung, baik di dalam tahap pencalonan maupun di dalam tahap pemilihan.

Modal politik ini memiliki makna yang sangat penting karena Pilkada secara langsung yang kita ikuti menggunakan mekanisme '*party sistem*' dalam proses pencalonannya. Dikatakan menggunakan '*party sistem*' karena semua orang yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus melalui pintu partai politik. UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara langsung mensyaratkan bahwa ketika memasuki arena kontestasi semua pasangan calon harus diberangkatkan oleh partai politik tertentu. Hanya saja, tidak semua partai politik dapat mengajukan calon. Mengikuti logika sistem perwakilan, hanya partai politik atau sekumpulan partai politik yang memiliki jumlah kursi sebesar 15 persen dari total kursi di DPRD yang bisa mengusulkan calon Kepala Daerah (Pasal 59 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 36 Ayat 2 PP No. 6 Tahun 2005). Belakangan, calon perseorangan memang dimungkinkan ikut dalam Pilkada, tetapi aturan baru ini tidak begitu saja mampu mengesampingkan peran partai di dalam Pilkada.⁵

Modal kedua adalah modal sosial (*social capital*). Yang dimaksud dengan modal sosial di sini⁸ adalah berkaitan dengan bangunan rerasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon itu harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja

⁵ *Ibid.*, hlm. 185

tanpa didahului oleh perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan.

Dalam Pilkada secara langsung, modal sosial memiliki makna yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan modal politik. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar-benar layak untuk dipilih atau tidak. Manakala seorang calon dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.

Modal yang ketiga adalah modal ekonomi (*economic capital*) . Pemilu, termasuk Pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan calon pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagi-bagikan barang atau uang kepada para pemilih. Tujuannya, supaya pada saat pemilihan para pemilih akan mendukungnya.⁶

Pemilu merupakan langkah awal partai politik dalam bersaing dan/atau legislatif. Partai politik dan kandidat perlu memikirkan strategi untuk merebutkan kekuasaan untuk menduduki kursi eksekutif yang dapat menentukan kemenangan untuk meraih kursi kekuasaan tersebut.

Proses pemilu memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintah kepada rakyat yang diperintah. Pemilu tidak lepas dari partai politik, karena partai politik dapat menyalurkan aspirasi rakyat, dimana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu. Dengan kata lain bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik merupakan suatu penghubung antar rakyat dan pemerintah.

Dalam kontestasi pemilu, tidak ada satupun partai yang ingin kalah. Semuanya bermaksud meraih kemenangan. Untuk bisa menang dalam

⁶ *Ibid.*, hlm. 186

pertarungan, sebuah partai politik harus mutlak membutuhkan strategi pemenangan yang tepat.

Pada konsep dasar strategi, ada kesamaan antara kontestasi pemilu dan perang dalam militer. Pada dasarnya, strategi dalam memenangi kontestasi pemilu memiliki kemiripan dengan strategi perang. Tentu, ada pula yang membedakannya, yaitu disasar untuk mencapai kemenangan. Dalam perang, yang disasar adalah melemahkan dan menghancurkan pasukan musuh baik fisik dan segalanya, sehingga pasukan musuh menyerah atau binasa, sehingga kemenangan dapat diraih.

Sementara dalam kontestasi pemilu, target yang disasar partai pengusung maupun kandidat adalah simpati pemilih agar ia menjatuhkan pilihannya dalam pemilihan pada partai atau kandidat yang bersangkutan. Partai atau kandidat yang paling banyak dipilih oleh pemilih akan keluar sebagai pemenang. Jadi, pasukan menang dalam perang kalau musuh menyerah, sementara partai-partai memenangi kontestasi pemilu kalau mendapatkan suara paling banyak, sehingga pemenang kontestasi pemilihan dapat menampung dan mampu dijadikan sebagai penampung aspirasi masyarakat luas untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian melatar belakangi penulis untuk mengetahui Strategi Partai Politik dalam mencalonkan kadernya dalam mengikuti kontestasi Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam penelitian yang bukan berdasarkan patokan jumlah angka. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷ Dimana jenis penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini didapatkan di kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai keadilan Sejahterah (PKS) Kabupaten Padang lawas Utara berkedudukan

⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 34.

di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak. Struktur organisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan SK DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara nomor ; 075/D/SKED/DPW – AB-PKS/1432 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Irwan Asehat Siregar, Lc, S.Pdi
Sekretaris : H. Palit Rambe, S.Ag
Bendahara : Nurhasanah Harahap
Ketua Kaderisasi : Erwin Harahap
Ketua Kepemudaan : Elwin Siregar
Ketua BPKK : Firiani Nasution S.Pd.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan strategi awal yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam mengusung calon kepala daerah di Kabupaten Padang Laas Utara, Setidaknya penelitian ini berhasil mengungkapkan strategi-strategi secara garis besarnya. Seperti yang diutarakan oleh H. Irwan Asehat Siregar, Lc, S.Pdi, selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera dan Sekretaris DPD Partai PKS kab. PALUTA dalam langkah awal yang harus dilakukan antara lain yaitu:⁸

1. Pembentukan panitia atau tim penjangangan bakal calon kepala daerah
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dari eksternal maupun internal partai
3. Kemudian melakukan rapat eavaluasi pada perkembangan sosialisasi bakal calon
4. Pada hari pendaftaran panitia memberikan pendapat masing-masing terhadap bakal calon kepala daerah tersebut
5. Kalau bakal calon kepala daerah itu dari internal partai, maka akan dicari pasangannya berkoalisi dengan partai lain, biasanya yang diusulkan adalah yang paling tinggi survenya, dan kalau dari eksternal partai akan meminta komitmen, yaitu biasanya yang beraliansi kepada masyarakat dan kepada partai
6. Melakukan *Fit and Proper Test* pada calon yang akan diusung dari eksternal partai dengan meminta program yang memihak kepada masyarakat dan bekerja sama dengan partai dalam menjalankan pemerintahan.

⁸Wawancara Dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara tgl 20 Agustus 2018.

7. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan dalam mendorong dan memantapkan masyarakat dalam memberikan dukungan dan menggunakan hak pilih masyarakat dalam kegiatan atau proses politik seperti, pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada. Kampanye merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam meraih dukungan masyarakat terhadap calon yang akan diusung. Dalam berkampanye menggunakan dua cara seperti hasil wawancara dengan H. Palit Rambe, S.Ag selaku sekretari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Lawas Utara "Kampanye sangat dibutuhkan untuk menjaring massa, melalui model kampanye terbuka dan model kampanye tertutup".

Kampanye terbuka dilakukan dengan melakukan *long march*, berorasi dihadapan para simpatisan dan pendukung partai dengan catatan harus kampanye yang terjadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan harus ikut dari partai ke lapangan, sedangkan kampanye tertutup dilakukan dengan mendatangi langsung ketokoh warga masyarakat".

Kemudian strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pasangan calon yang di usungnya, penulis dapat menyampaikan bentuk-bentuk strateginya antara lain:

1. Pelayanan Masyarakat

Partai Keailan Sejahtera sebagai partai dakwahpun memiliki strategi yang digunakan untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya di kabupaten Padang Lawas Utara. salah satu strategi yang digunakan PKS adalah pelayanan terhadap masyarakat, seperti yang diutarakan ketua DPD PKS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

"strategi Politik PKS lebih berorientasi pada pelayanan, membangun komunikasi, aktif berkomunikasi dengan masyarakat, dan kita juga siap menerima atau dalam hal ini, PKS siap membuktikan diri sebagai partai yang siap mendengar apa masukan-masukan masyarakat terhadap kandidat sesudah terpilih nantinya".

2. Strategi komunikasi

Strategi komunikasi bertujuan menyampaikan program-program, ide-ide meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan (memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilah dan memilih media), membangun consensus (seni berkompromi, bersedia membuka diri). Artinya dengan ketokohan seorang

politikus dan kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi.

3. Sosialisasi

Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan partai politik dalam rangka mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan persoalan dan kegiatan politik supaya mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat.

4. Idiologi Islam

Partai Keadilan Sejahtera sangat terkenal dengan ideologi islamnya, bahkan Partai Keadilan Sejahtera mengaku bahwa peran ideologi islamnya sangat besar. Karena kita melihat bahwa mayoritas penduduk kabupaten Padang Lawas Utara adalah mayoritas Islam, ini menjadi daya dorong tersendiri untuk mampu mengambil suara besar dari umat islam itu.

Dari strategi-strategi di atas, hasil penelitian ini juga mendapatkan kendala bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya yaitu :

1. Masyarakat mempertanyakan kepada tim, kenapa Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya pada periode pertama dan pada pasangan yang sama tidak mengusung pasangan tersebut.
2. Calon yang diusung kurang berkordinasi dengan parai yang pada akhirnya terkesan bekeja dengan pekerjaannya masing masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Untuk Memenangkan Calon Kepala Daerah Yang Diusungnya Di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Strategi Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya di Kabupaten Padang Lawas Utara: *Pertama*, Sosialisasi dalam rangka pendekatan secara langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan partisipasi dan mengajak orang tersebut samapi ketinggian memberikan dukungannya. *Kedua*, Pembentukan panitia atau tim penjangangan bakal calon kepala daerah yang terdiri dari kader-kader Partai yang lebih berpengaruh (figur ustatz). *Ketiga*, Melakukan *Fit and Proper Test* pada calon

yang akan diusung dari eksternal partai dengan meminta program yang memihak kepada masyarakat dan bekerja sama dengan partai dalam menjalankan pemerintahan. *Keempat*, Ikut serta dalam kampanye, karena sangat dibutuhkan untuk menjangkau massa, melalui model kampanye terbuka dan model kampanye tertutup. *Kelima*, Kegiatan yang Terselenggara (*Event*) merupakan kegiatan yang diadakan untuk mengumpulkan pihak-pihak tertentu untuk saling bertukar pendapat atau menyampaikan gagasan. *Event* juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mendekati diri kepada masyarakat atau salah satu strategi yang digunakan dalam menghadapi pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara. *Keenam*, Selalu mengajak masyarakat untuk memilih kandidat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. *Ketujuh*, Menyampaikan Visi-Misi Kandidat kepada masyarakat. *Kedelapan*, Tim harus betul-betul bekerja dalam menangkan calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. *Kedelapan*, Pelayanan masyarakat yang berupa program-program yang bertujuan untuk mendekati diri kepada masyarakat, mulai dari pelayanan sosial, pendidikan, dan dalam sisi keagamaan.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya di Kabupaten Padang Lawas Utara: *Pertama*, Masyarakat mempertanyakan kepada tim kenapa Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya pada periode pertama tidak mengusung pasangan Bahrum Harahap dan Riskon Hasibuan, sementara pada pemilihan periode kedua pasang yang sama, Partai Keadilan Sejahtera mengusung Pasangan Bahrum Harahap dan Riskon Hasibuan? Tim memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah melihat kinerja pemerintahan kabupaten Padang Lawas Utara sudah mempunyai kemajuan. Makanya pada periode kedua Partai Keadilan Sejahtera berani mengusung pasangan Bahrum Harahap dan Riskon Hasibuan maju kembali pada periode kedua, dan Partai Keadilan Sejahtera melihat pasangan calon tersebut akan memenangkan pemilihan kepala daerah di kabupaten Padang Lawas Utara. *Kedua*, Calon yang didukung kadang terlalu tidak banyak berkordinasi dan kerja samanya dengan partai yang pada akhirnya terkesan bekerja dan mengerjakan kerja masing-masing, contohnya seperti *Money Politic* (Politik uang). Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali diselenggarakan pemilu legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah maka *money politic* menjadi “corak hitam” yang selalu pekat

mewarnai. Tak jarang hingga masyarakat akhirnya menganggap hal ini sebagai perilaku yang lumrah (biasa). Hal ini tidak saja terjadi diKabupaten Padang Lawas Utara saja melainkan merata dihampir seluruh wilayah Indonesia. Secara khusus Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan pemberian bantuan bertujuan untuk menjaring dukungan pemilih bukan berua uang, namun berupa bentuk program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Padang Lawas secara Umumnya, karena Politik Uang sangat dihindarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik: Sebuah Otokritik*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas. 2006

UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*
Jakarta: Kencana, 2011

Kajung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2011